

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bagian ini akan dipaparkan gambaran umum Partai Keadilan Sejahtera. Di mana gambaran umum ini memuat tentang sejarah partai, platform partai, struktur kepengurusan, keanggotaan dan basis massa partai, keuangan partai, hasil pemilu, dan kesimpulan.

A. Sejarah Kemunculan PKS

PKS menjadi salah satu partai Islam yang cukup diperhitungkan dalam konstelasi politik tanah air pada dekade pertama era Reformasi. Partai ini di-inisiasi oleh kelompok dakwah yang dikenal dengan Jamaah Tarbiyah. Setelah lebih dari 20 tahun bergerak di bawah permukaan, terutama dalam wilayah sosial dan keagamaan, momentum demokratisasi mengantar kelompok ini memasuki percaturan politik nasional dengan membentuk partai politik pada 1998 (Noor: 2015: 107).

Beberapa tokoh senior seperti Hilmi Aminuddin, seorang figur aktivis dakwah lulusan Universitas Madinah yang menempatkan fondasi awal gerakan dan membangun jaringan pertama Jamaah Tarbiyah di tahun 1980-an. Tokoh utama lain adalah Abdi Sumaiti yang dikenal dengan Abu Ridha, lulusan Mesir yang cukup lama berkecimpung dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Menurut Sila (2004) yang dikutip dari Noor (2015: 108), sekembalinya ke tanah air, Hilmi Aminuddin dan Abu Ridha mewakili generasi pertama aktivis tarbiyah yang pada tahap awal memainkan peranan sentral dalam pertumbuhan Jamaah Tarbiyah.

Dalam perkembangannya, gerakan ini melahirkan generasi kedua yang terdiri atas beberapa tokoh yang di kemudian hari banyak memegang posisi strategis dalam kehidupan partai. Hadirnya generasi kedua ini, termasuk almarhum Rahmat Abdullah, salah satu pendiri PKS yang sebelum dia meninggal dihormati sebagai *syaiikh at tarbiyah* dan Dr. Hidayat Nur Wahid yang sempat menjadi Presiden Kedua PKS dan Ketua MPR RI, ternyata semakin memperkuat gerak langkah gerakan ini. Tokoh-tokoh generasi pertama dan kedua ini semasa melanjutkan studi mereka di Timur Tengah banyak menjalin hubungan langsung dengan kelompok *Ikhwanul Muslimin* (IM), sehingga peranan mereka menjadi penting dalam perkembangan gerakan tarbiyah dan kemudian di dalam partai.

Meskipun demikian, beberapa tokoh senior yang berpengaruh dalam gerakan ini tidak semua berlatar belakang pendidikan Timur Tengah. Dr. Nurmahmudi Ismail, misalnya, mantan Ketua Umum Partai Keadilan (PK) adalah lulusan University A & M Texas; Rahmat Abdullah adalah alumnus Perguruan Islam Assyafiiyah Jakarta; dan Anis Matta yang sempat menjadi Sekretaris Jenderal dan Presiden PKS adalah lulusan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta (Noor: 2015, 109).

Menurut Machmudi dalam Noor (2015: 109), tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tokoh utama Jamaah Tarbiyah memang memiliki hubungan yang erat dengan IM dan jaringannya selama mereka menempuh masa studi. Mereka terinspirasi dengan ajaran IM melalui berbagai buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh penting IM. Hubungan yang erat ini pada akhirnya memengaruhi dan membedakan karakteristik Jamaah Tarbiyah dengan kelompok-kelompok *mainstream* lainnya,

bahkan termasuk dengan DDII sebagai institusi pendukung pertamanya. Hal ini terlihat dari pernyataan Aminuddin yang dikutip oleh Noor (2015: 110) bahwa “Kelompok ini tidak berkiblat ke Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau kelompok-kelompok Islam lainnya”. Menjalankan pemahaman atas Islam yang terinspirasi terutama oleh ajaran Hasan Al-Banna dan mengembangkan metode dakwah Ikhwanul Muslimin adalah komitmen yang menjadi landasan para aktivis tarbiyah memasuki arena dakwah di Indonesia.

Kelompok tarbiyah ini bergerak dalam sel-sel yang aktif dan terbatas untuk menjalankan pemahaman dan misinya. Pergerakan ini berada di domain masyarakat sipil, yang pada awalnya bergerak di masjid-masjid kampus, seperti Masjid Salahuddin di UGM, Masjid Arief Rahman Hakim di UI, Masjid Salman di ITB, Masjid Al-Ghiffari di IPB, dan Masjid Manarul Ilmi di ITS. Masjid kampus ini menjadi tempat ideal karena cenderung luput dari amatan rezim dan aparatnya. Perlu dipahami bahwa rezim Orde Baru saat itu memiliki kecenderungan Islamophobia, sehingga sejumlah kelompok dan tokoh Islam yang kritis dicurigai dan dianggap sebagai “ekstrem kanan”. Rezim ini kerap menyebarkan aparatnya untuk memonitor tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok Islam yang sudah ditargetkan untuk membatasi dan melokalisasi aktivitas dakwah mereka dengan alasan stabilitas keamanan. Walaupun demikian, rezim ini tidak memperhitungkan masjid kampus sebagai ancaman karena dianggap hanya sebagai tempat bagi mahasiswa untuk beribadah dan membahas masalah-masalah akhirat (Noor, 2015: 110).

Di sisi lain, kelompok tarbiyah melihat jaringan aktivis mahasiswa Islam di kampus-kampus sebagai kelompok potensial yang dapat turut menyuburkan dakwah, namun belum tergarap dengan sistematis. Jamaah Tarbiyah kemudian mengambil alih jaringan ini dan memberikan perspektif keislaman dan metode dakwah baru, dan tidak sedikit aktivis mahasiswa dan jaringan dakwah Islam bergabung dalam gerakan ini. Seiring berjalannya waktu, Jamaah Tarbiyah memperoleh respons positif dan menarik minat banyak mahasiswa, sehingga kelompok ini dapat dirasakan hampir di seluruh universitas terkemuka di Indonesia hanya dalam kurun waktu kurang dari satu dekade.

Dengan demikian, tidak heran jika pada awal gerakannya kebanyakan kader yang direkrut adalah anak-anak muda berpendidikan tinggi yang masih di dalam proses mencari identitas diri. Hal ini pada akhirnya melabelkan PKS sebagai partai anak muda, urban, dan terdidik. Meski demikian, PKS dalam perkembangannya juga melebarkan sayap ke komunitas-komunitas nonkampus. Lambat tetapi pasti, kelompok ini juga berkembang di komunitas Islam di wilayah pedesaan (Noor, 2015: 111).

Hal lain yang berkaitan dengan perkembangan kelompok ini di kampus adalah karena dipandang sejalan dengan *grand design* (rancangan besar) pengembangan dakwah yang diyakini oleh kalangan tarbiyah yang mencakup empat fase, yakni *mihwar tanzhimi*, *mihwar sya'bi*, *mihwar muasasi*, dan *mihwar daulah*. Pengembangan pertama terpusat pada perbaikan individu, yang dilanjutkan dengan perbaikan keluarga, masyarakat, dan terakhir perbaikan di level negara. Atas dasar inilah di awal 1980-an gerakan ini memusatkan aktivitasnya di kampus-

kampus (*mihwar tanzhimi*) sebagai bagian pembentukan pribadi muslim yang baik, dengan harapan mereka memiliki komitmen yang kuat atas dakwah dan menjadi aktivis dakwah yang siap menciptakan masyarakat Islam (Noor, 2015: 111).

Setelah dirasa cukup berhasil melalui tahapan pertama tersebut, di awal tahun 1990-an Jamaah Tarbiyah melaksanakan fase kedua dengan mulai membangun keberadaannya di masyarakat, khususnya melalui pendirian berbagai institusi sosial, ekonomi, komunikasi, dan pendidikan. Sebagai realisasi, sejumlah aktivis kemudian mendirikan berbagai penerbit (Gema Insani Press, Robbani Press, Era Intermedia, Al-Kautsar, Asyamil, dan Tarbiyatuna), majalah (Sabili, Saksi, Ummi, dan Anida), yayasan Islam untuk berbagai kajian Islam dan pesantren (Yayasan Haramain dan Al-Hikmah), serta kelompok belajar atau kajian (Nurul Fikri dan Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer) (Noor, 2015: 112).

Di akhir tahun 1990-an, gerakan ini mulai memasuki dunia politik sebagai fase pengembangan dakwah selanjutnya. Masuknya aktivis tarbiyah ke dunia politik merupakan sebuah respons terhadap perkembangan terkini dalam perpolitikan Indonesia. Kemudian tahun 1998 menjadi pengalaman politik langsung pertama gerakan ini di arena politik nasional melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini didirikan di bulan-bulan akhir Orde Baru dengan tujuan utama memperjuangkan aspirasi rakyat, yang berarti menumbangkan kekuasaan Soeharto dan mendorong reformasi. Bersama dengan unsur-unsur reformasi lainnya, KAMMI akhirnya berhasil menjatuhkan Rezim Soeharto, dan dianggap sebagai akhir dari “Periode Mekkah”, di mana dakwah yang dilakukan secara diam-diam, digantikan dengan era demokrasi yang membawa

situasi menjadi lebih kondusif. Oleh sebagian besar aktivis tarbiyah, situasi ini dilihat sebagai peluang untuk memperluas gerakannya (Noor, 2015: 113).

Dikutip dari wawancara dengan Hidayat Nur (dalam Noor, 2015: 113), sebagian aktivis menganggap bahwa akhir tahun 1990-an bukan waktu yang tepat untuk tarbiyah membuka diri secara terang-terangan dan memasuki dunia politik. Hal ini menjadi pemicu perdebatan, karena bagi mereka, para aktivis tarbiyah seharusnya tetap konsisten dengan skema perkembangan bertahap dakwah yang mengisyaratkan bahwa level berikutnya baru akan dimulai tahun 2010. Gerakan ini diyakini belum siap untuk berjuang di tingkat politik riil, khususnya karena kurangnya sumber daya manusia, jaringan politik, dan kapasitas finansial. Para tokoh seperti Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, dan Ihsan Tanjung adalah bagian dari kelompok yang tidak sepakat, dan saat itu mereka menyarankan untuk menunggu hingga seluruh unsur tarbiyah siap memasuki domain politik.

Polling internal akhirnya dilakukan untuk melihat seberapa besar antusiasme para aktivis tarbiyah memasuki fase baru dakwah. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas kader setuju dengan akselerasi ini dan siap muncul di lingkup politik melalui pendirian partai. Gerakan tarbiyah akhirnya mendirikan partai politik yang bernama Partai Keadilan (PK) pada 9 Agustus 1998 yang dideklarasikan di halaman Masjid Al-Azhar di Jakarta yang dihadiri sekitar 50.000 orang. Ini merupakan momen untuk pertama kalinya di mana hampir seluruh tokoh kunci gerakan muncul di lingkup publik. PK dibangun sebagai partai dakwah yang melihat arena politik sebagai sarana dakwah agar nilai-nilai Islam lebih berdampak di kehidupan masyarakat dan pemerintah. Salah satu pendiri PK, Mutammimul Ula,

menjelaskan komitmen tersebut dengan menyatakan bahwa PK akan menggunakan parlemen sebagai “mimbar dakwah” (Waluyo, 2005: 31). Atas dasar itu, kalangan Jamaah Tarbiyah melihat bahwa partainya hanya mementingkan untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik, tetapi juga sebagai perangkat pengembangan moral Islam di masyarakat.

Setelah lima tahun keberadaannya di kancah politik nasional, disebabkan oleh regulasi ambang batas suara yang mendiskualifikasi PK dari keikutsertaan untuk pemilu berikutnya, pada tahun 2003, PK secara resmi menyatakan diri sebagai bagian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai partai baru untuk para aktivis tarbiyah, PKS yang dideklarasikan pada 20 April 2003 ini dimaksudkan sebagai kelanjutan PK dengan seluruh visi dan tujuannya beserta segenap aset yang dimilikinya.

B. Platform Partai Keadilan Sejahtera

Pada bagian ini, pertama akan dipaparkan visi dari PKS, di mana visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah “Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.” Dari visi tersebut, dapat diuraikan bahwa masyarakat madani ialah masyarakat dengan peradaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis, serta bergotong-royong menjaga kedaulatan negara. Adil ialah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan –baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-kemasyarakatan– ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang (MPP PKS, 2008: 1).

Kemudian terdapat kata “sejahtera” yang berarti mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan sejatinya adalah keseimbangan (*tawazun*) yang merupakan kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi pada dirinya (ruh, akal, jasad). Sedangkan “bermartabat” bermakna bahwa secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain (MPP PKS, 2008: 2).

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mengembang beberapa misi (MPP PKS, 2008: 2-4), antara lain:

- 1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi dengan; mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi, menumbuhkan kepemimpinan yang kuat serta mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, penegakan hukum yang

diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.

- 2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*.
- 3) Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera.
- 4) Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.

Kemudian, selain misi di atas, PKS mencanangkan 14 program dalam melaksanakan agenda prioritas dalam berkhidmat untuk rakyat (Pks.id, 2016), diantaranya adalah:

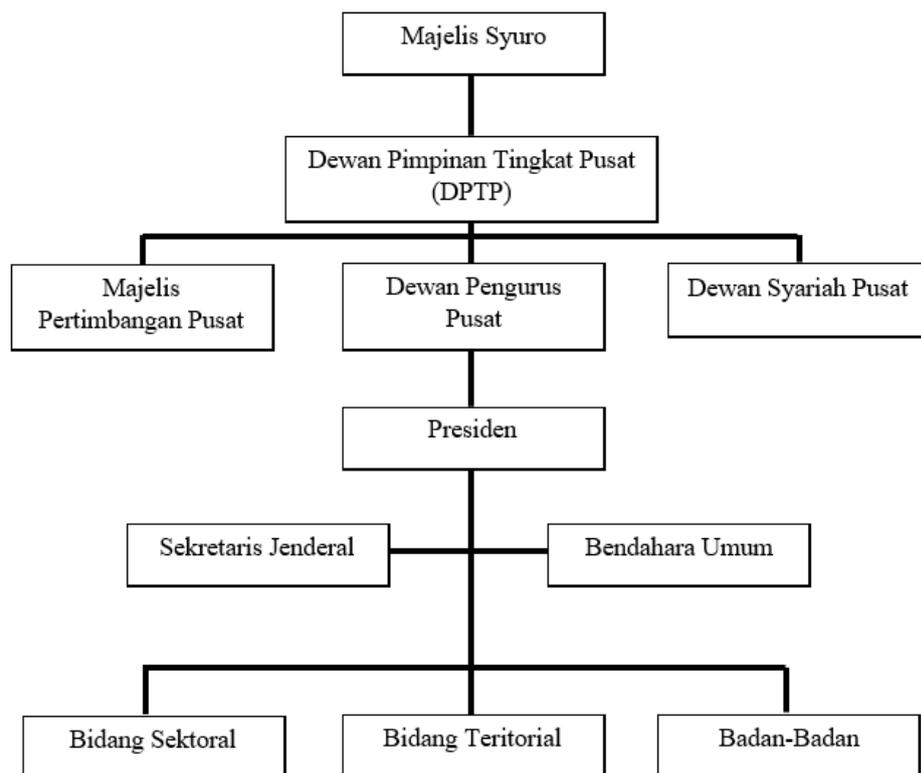
- 1) Mengokohkan peran kaderisasi bagi pengokohan karakter Bersih, Peduli, dan Profesional
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Partai yang transparan, akuntabel, dan partisipatif khususnya dalam pengelolaan keuangan, organisasi dan administrasi
- 3) Menata dan mengokohkan peran pejabat publikpks partai sebagai pelayan, pemberdaya, dan pembela umat dan rakyat bagi terwujudnya reputasi partai dakwah yang Bersih, Peduli, dan Profesional
- 4) Mengokohkan Peran Kepanduan dan Barisan Tanggap Bencana PKS untuk siap dan selalu waspada dalam melayani rakyat saat bencana dan keadaan darurat wilayah/daerah
- 5) Menggulirkan program Pilot Project 1000 pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) yang mengokohkan ekonomi umat
- 6) Memperkuat dan mengadvokasi peran pekerja, petani dan nelayan sebagai modal ekonomi, sosial dan politik bangsa
- 7) Mengokohkan peran sosial partai melalui Pusat Khidmat PKS, Rumah Aspirasi hingga Rumah Keluarga Indonesia yang melayani dan mengadvokasi rakyat
- 8) Mengokohkan peran partai sebagai jembatan ukhuwah umat bagi terwujudnya Islam moderat dan modern yang mengokohkan kontribusi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin

- 9) Mendorong pelaku seni budaya untuk menghadirkan produk seni dan budaya yang menginspirasi, mencerdaskan dan membangun mental tangguh bangsa
- 10) Menggulirkan nilai-nilai ketahanan keluarga (*family mainstreaming*) baik secara structural (perundang-undangan) maupun kultural (bersama seluruh elemen masyarakat) mengantisipasi perkembangan yang kian mengkhawatirkan
- 11) Memperjuangkan paket Undang-Undang yang mengokohkan transformasi struktural perekonomian Indonesia yang memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan menurunkan rasio gini
- 12) Mengusulkan paket Undang-Undang yang menghadirkan demokrasi substansial yang mudah, murah dan menjamin mandate rakyat terlaksana: proporsional tertutup, pembatasan dana kampanye, kampanye yang terbatas dan mengedepankan edukasi politik publik dengan menekan praktik politik uang
- 13) Mengadvokasi desa agar berdaya, mandiri dan kuat secara sosial serta memiliki kekuatan religious melalui peran para pemuda dan perempuan pelopor desa
- 14) Mengokohkan peran Koalisi Merah Putih (KMP) guna menghadirkan lembaga legislatif di pusat dan daerah yang bersih dan produktif sebagai penyambung suara rakyat.

C. Kepengurusan DPP Partai Keadilan Sejahtera

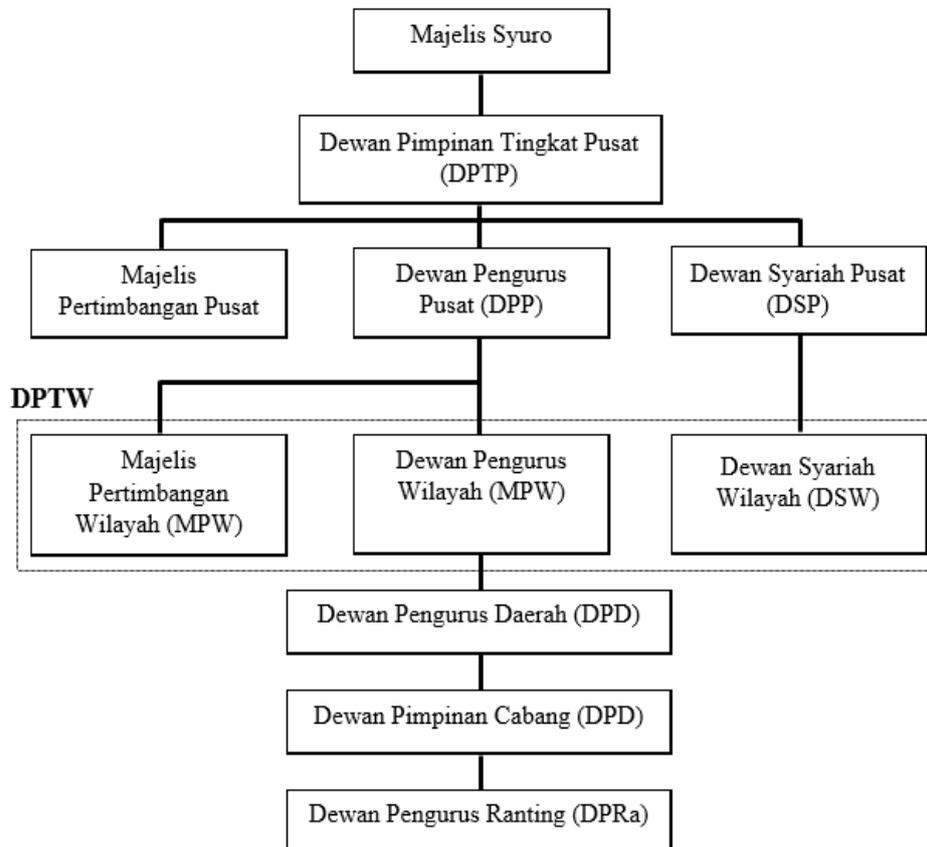
Pada bagian ini, akan dipaparkan dua struktur kepengurusan, yakni struktur DPP PKS dan Struktur Organisasi PKS di tingkat nasional (dari pusat hingga ranting).

Gambar 2.1 Struktur Kepengurusan DPP PKS



Sumber: Diolah dari Pks.id

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Nasional PKS



Sumber: Diolah dari Pks.id

Struktur organisasi partai di tingkat nasional dimanifestasikan oleh DPTP. Kemudian terdapat DPTW yang berada di tingkat provinsi dan DPTD di tingkat kabupaten dan kota. Di bawahnya terdapat DPC yang berada di tingkat sub-distrik dan sub-kota, dan tingkat paling bawah dalam struktur organisasi partai diwakili oleh DPRa yakni di tingkat desa. Mengenai musyawarah organisasi partai, terdapat Musyawarah Majelis Syura dan Munas di tingkat nasional. Selain itu, ada Muswil di tingkat provinsi, lalu Musda di tingkat kabupaten dan kota, Muscab di tingkat kecamatan dan sub-kota dan Musran di tingkat desa.

D. Keanggotaan dan Basis Massa PKS

Berkeanaan dengan anggota dan pendukungnya, pada tahun 1999, PKS memiliki pendukung yang sedikit yang sebagian besar terkonsentrasi di antara anggota dan alumni Jamaah Tarbiyah. Partai ini akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai partainya anak muda, perkotaan, kalangan terdidik, kelas menengah religius dan mahasiswa. Di tahun 2004, PKS membuat terobosan di kalangan pemilih kelas pekerja di daerah perkotaan, yang diuntungkan dari program sosial dan kesejahteraan masyarakat PKS. Setelah itu, partai ini menyatakan diri sebagai partai terbuka pada tahun 2008 dan mengajak non-Muslim untuk bergabung menjadi anggota serta membuat terobosan lebih lanjut ke masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Muhtadi (dalam Al-Hamdi, 2017: 86) memberikan beberapa bukti nyata bahwa partai ini cenderung menjadi partai terbuka dan menjangkau semua segmen pemilih, di mana PKS mencantumkan tokoh masyarakat seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan Soekarno dalam iklan komersial PKS di beberapa televisi serta kehadiran grup musik pop seperti Gigi dalam kampanye PKS pada tahun 2009.

Untuk terus menarik dukungan rakyat, partai ini menerapkan pendekatan budaya dengan meningkatkan jaringan JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) di seluruh negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan ini cukup efektif untuk PKS. JSIT mengkoordinasikan semua sekolah IT dengan visi menjadi pusat untuk memberdayakan sekolah IT di Indonesia menuju sekolah yang efektif dan berkualitas. Pada 2013, JSIT secara nasional memiliki 1926 sekolah, 68 sekolah menengah atas dan tiga kolase pelajar (Republika, 2014). Meskipun JSIT tidak

memiliki hubungan struktural dengan PKS, pada kenyataannya, banyak aktivis, anggota dan pendukung telah terlibat dalam mengembangkan JSIT baik sebagai donatur, pendiri, pemilik, guru atau peran penting lainnya, bahkan anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, PKS dan JSIT memiliki platform serupa di bidang pendidikan. Simbol mereka juga menunjukkan hubungan yang erat. Di luar JSIT, PKS mempertahankan hubungan budaya ideologisnya dengan ROHIS, LDK, Salimah, dan PWK (Al-Hamdi, 2017: 87).

E. Keuangan Partai Keadilan Sejahtera

Menurut Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq sebagaimana dilansir oleh *Republika.co.id* (2013), partai tersebut memiliki banyak sumber keuangan. *Pertama*, dari kelompok pengajian yang dinamakan *Halaqah Tarbawiyah*, yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 ribu kelompok. Kelompok pengajian ini menghimpun dana partai setiap pekan dengan masing-masing kelompok dapat menghimpun sebesar 50 hingga 100 ribu. *Kedua*, PKS menerapkan infak wajib bulanan yang terdiri dari iuran wajib dan zakat penghasilan bagi anggota inti yang jumlahnya lebih dari 600 ribu orang di seluruh Indonesia. Besaran infak tersebut tentu disesuaikan dengan besaran penghasilan sehingga jumlahnya berbeda bagi setiap anggota.

Sumber selanjutnya yaitu zakat tahunan yang terdiri dari zakat maal, zakat fitrah, infak, dan shadaqah anggota yang diterapkan oleh PKS. Lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola kader PKS ini juga menghimpun zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat. Kemudian, dari pejabat publik, baik legislatif maupun

eksekutif juga diwajibkan memberikan infak bulanan. Anggota fraksi PKS DPR tiap bulan membayar infak senilai Rp 20 juta ke DPP PKS. Terdapat 57 anggota di DPR, 200-an anggota di DPRD Provinsi, dan 2000-an anggota DPRD Kab/Kota. Besaran infak untuk setiap anggota juga berbeda-beda (Republika, 20 Mei 2013).

Selain iuran-iuran di atas, PKS juga menerapkan bentuk kerjasama program. Bagi kader-kader PKS yang mengelola lembaga pendidikan, sosial, dakwah dan bisnis dapat menjalin kerjasama melalui program. Misalnya, BPR syariah milik kader dapat bekerjasama program dengan Bidang Ekonomi di PKS. Selain itu, PKS juga menggunakan dan abantuan keuangan partai politik dari pemerintah setiap tahun berdasarkan perolehan suara pemilu. Terakhir, PKS mengenal hibah aset bergerak dari dermawan, seperti ada yang memberikan motor, mobil, dan komputer. Perlu diketahui bahwa sesuai AD/ART partai, pendistribusian partisipasi pendanaan seperti yang disebutkan di atas sifatnya tidak terpusat, artinya tidak dipegang dan dikendalikan penuh oleh Presiden PKS (Republika, 20 Mei 2013).

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, PKS juga mendapatkan bantuan keuangan yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dijelaskan di Pasal 5 bahwa penentuan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN/APBD prov/APBD kab./kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR/DPRD prov/DPRD kab./kota bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode selanjutnya. Kemudian, jumlah bantuan keuangan

kepada partai politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD prov, dan DPRD kab./kota dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab./kota periode berkenaan.

F. Hasil Pemilu Partai Keadilan Sejahtera

Sejarah telah mencatat bagaimana hasil perjuangan PKS dalam setiap pemilu. Pada 1999, PKS memperoleh 1.436.565 suara (1,36 persen) dan tujuh kursi (1,52). Perolehannya meningkat secara signifikan pada tahun 2004 dengan memperoleh 8.325.020 suara (7,34) dan 45 kursi (8,18 persen). Pada 2009, pemungutan suara cukup stabil dengan 8,204,946 (7,89 persen) dan 57 kursi (10,17 persen). Pada tahun 2014, PKS turun sebesar 1,09 persen dari Pemilu 2009 dengan perolehan 8.480.204 suara (6,79 persen) dan 40 kursi (7,14 persen). Berdasarkan Pemilu 2014, basis pemilih PKS ditemukan terutama di daerah perkotaan Jawa dan luar Jawa. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk mendominasi dapil tertentu, para pemilihnya tersebar di semua wilayah (Al-Hamdi, 2017: 87).

G. Kesimpulan

Kemunculan Partai Keadilan Sejahtera di-inisiasi oleh kelompok dakwah yang dikenal dengan Jamaah Tarbiyah pada dekade pertama era Reformasi. Gerakan tarbiyah akhirnya mendirikan partai politik yang bernama Partai Keadilan (PK) pada 9 Agustus 1998, kemudian berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2003. PKS mengandalkan basis massa di kalangan anak muda, mahasiswa, kalangan terdidik, serta kelas menengah religius. Basis massa

pendukung PKS sebagian besar tersebar di wilayah perkotaan. Hasil pemilu dari 1999 hingga 2014 menunjukkan bahwa PKS merupakan salah satu partai yang cukup kuat, terutama dibuktikan sebagaimana Pemilu 2004 mengalami kenaikan yang drastis dan cukup stabil, meskipun di Pemilu 2014 terjadi sedikit penurunan.